



# **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**

**NOMOR 9 TAHUN 2006**

### **T E N T A N G**

#### **TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BUOL**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Otonomi Desa, maka untuk kelancaran tugas Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan Desa, maka tata cara pengangkatan perangkat Desa sangat diharapkan.
- b. bahwa untuk melaksanakan dan memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900);
3. Undang – undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
5. Undang–Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL.**

**dan**

**BUPATI BUOL**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten, wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa.
13. Sekertaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
14. Dusun atau dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
15. Kepala Dusun adalah pelaksana tugas kepala desa wilayah kerja tertentu.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun.

#### **Pasal 3**

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pelaksana Tehnis Lapangan.
  - b. Unsur kewilayahan yaitu unsur pelaksana Kepala Desa di wilayah kerjanya, dan Kepala – kepala Urusan.
- (3) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Kaur terdiri dari 3 dan unsur wilayah.

## **BAB III**

### **MEKANISME DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretaris Desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat tamat dan berijazah
  - b. Mempunyai pengetahuan tentang tehnis pemerintahan
  - c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran
  - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan
  - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
  - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan
  - g. Selama melaksanakan tugas tidak bisa dimutasikan
- (2) Sekretaris Desa sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Kepala Desa dari Penduduk Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## **BAB IV**

### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Masa Jabatan Perangkat Desa lainnya selama 6 Tahun dan sewaktu – waktu dapat diberhentikan berdasarkan SK Kepala Desa, sebagaimana diatur pada bagian lain Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Jabatan Perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa menunjuk seorang dari Perangkat Desa dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 Bulan harus sudah dilaksanakan Pemilihan dan atau Pengangkatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Perangkat Desa selama menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban harus bersifat netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## **BAB V**

### **LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 8**

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melanggar persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perda ini
- b. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Prioritas, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- d. Menyalahgunakan kewenangan, bertindak sewenang-wenang, melakukan Peyelewengan, bertindak diluar ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

#### **Pasal 9**

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 10**

Perangkat Desa lainnya berhenti karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Berakhir masa jabatannya
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Telah diangkat Pejabat baru.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ini Perda ini.
- f. Melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepentingan sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa.
- g. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau yang tersangkut dalam suatu tindak pidana atas persetujuan Kepala Desa dapat memberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Penjabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan salah.
- (5) Dalam hal Sekertaris Desa belum terisi dari Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka Kepala Desa menunjuk pelaksana tugas Sekertaris Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 12 Tahun 2001 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Disahkan di Buol  
pada tanggal 10 Oktober 2006

**BUPATI BUOL**  
  
**H. A. KARIM HANGGI**

Diundangkan di Buol  
pada tanggal 10 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL**

  
**HENGKYE PARIMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**TAHUN 2006 NOMOR 9**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL**  
**NOMOR 9 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**I. U M U M**

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya mengenai Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu Landasan Hukum yang kuat dan pasti mengenai Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa sehingga menjadi pangkal tolak dalam pembinaan dan pengembangan desa di Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas